

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No.38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang dimaksud dengan sungai adalah Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai sangat penting bagi kehidupan manusia yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan air bersih, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk pengairan sawah, transportasi dan sebagainya. Kelestarian fungsi sungai perlu dijaga dan dipertahankan, karena sungai adalah sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu sarannya ialah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada PP No.38 Tahun 2011.

Diantara beberapa sungai yang melintas di Yogyakarta, Sungai Code menjadi pusat perhatian banyak pihak dan memiliki tingkat kemendesakan dalam pengelolaannya¹. Code Sungai Code atau Sungai Boyong yang bersumber dari Gunung Merapi, dimana Sungai Code melewati di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Bantaran Kali Code membujur dari Jembatan Tungkak, Jembatan Sayidan, Jembatan Juminahan, Jembatan Gondolayu, Jembatan

¹ Widodo Brontowiyono, Ribut Lupiyanto, Donan Wijaya, 2010, "Pengelolaan Kawasan Sungai Code Berbasis Masyarakat". Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, hlm 1.

Sarjito, Jembatan Blunyah, Jembatan Ring Road Utara, Jembatan Dayu, dan Jembatan Plumbon². Pada bagian tengah Sungai Code lebih didominasi permukiman warga padat penduduk. Penduduk mendirikan bangunan kumuh dan bangunan kumuh lainnya untuk segala aktivitas atau kegiatan mereka. Bangunan-bangunan itu ada yang liar dan ada yang diizinkan, adanya bangunan dan permukiman penduduk di bantaran sungai tersebut dapat membawa dampak negatif, yaitu adanya sampah-sampah dan limbah yang mengakibatkan terjadinya pencemaran sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang sungai dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Sungai dan sempadannya sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Penghidupan masyarakat dan lingkungannya perlu di jaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan dan memelihara daerah sekitarnya.

Di bantaran sungai terdapat rumah-rumah warga yang jaraknya dari sempadan Sungai Code kurang dari 3 (tiga) meter, ada bangunan permanen dan ada bangunan tidak permanen digunakan untuk berbagai kepentingan seperti rumah, warung, dan lainnya yang mana didirikan di atas sempadan sungai. Kebanyakan dari bangunan tersebut di dirikan

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Code , diakses pada tanggal 04 september 2019

secara ilegal tanpa izin dari pemerintah. Bangunan yang berada di bantaran Sungai Code tersebut sempat di gusur oleh pemerintah karena melanggar aturan perundang-undangan terhadap garis sempadan sungai dan pemerintah menjanjikan akan menyediakan pemukiman yang layak pada masyarakat tersebut. akan tetapi sampai saat ini belum terealisasi dengan baik mengenai pemukiman untuk masyarakat tersebut

Menurut pengamatan penulis rumah penduduk yang berada di bantaran Sungai Code tersebut rata-rata tidak mempunyai kamar mandi sendiri dalam rumah. Mereka mendirikan kamar mandi di bantaran sungai Code tersebut. Sering terjadi banjir pada saat hujan lebat dikarenakan tidak adanya lagi resapan air jikalau hujan turun karena sudah adanya bangunan yang ada di bantaran sungai tersebut. Padahal dalam Pasal 11 PP No 38 Tahun 2011 tentang sungai, sudah jelas bahwa adanya larangan membuat bangunan di bantaran sungai.

Sungai Code juga sering dikeruk karena banyak sampah-sampah yang tersumbat yang mana sebagian besar berasal dari kegiatan rumah tangga yang berasal dari bangunan yang berada di bantaran sungai. adanya beberapa kandang ayam yang di dirikan pada bantaran Sungai Code tersebut sehingga jikalau melewati bantaran sungai tersebut adanya bau tidak enak dikarenakan aktivitas dari masyarakat dan bau Sungai Code tersebut . serta di jelaskan pula pada fungsi sempadan sungai yang mana adalah bertujuan menciptakan kawasan tepi sungai yang tertata asri, rindang dengan tumbuh tumbuhan, ada burung-burung berkicau, dan air

jernih yang mengalir dengan berbagai jenis ikan didalamnya sehingga membuat suasana nyaman dan tenteram (PP No. 38 Tahun 2011, Penjelasan Pasal 5 Ayat (5)).

Pemerintah Daerah masih jarang mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sempadan sungai. Jika ada pekerjaan atau membuat program, umumnya justru merusak ekologi sempadan sungai, misalnya membuat penguatan tebing dengan talut, *site pile*, dan beton cor, serta membuat jalan persis di pinggir palung sungai.³ Masyarakat juga secara salah mengampanyakan membangun rumah menghadap sungai sehingga program ini justru semakin intensif merusak ekologi sempadan sungai.

Dari latar belakang di atas terlihat bahwa yang tercantum dalam Pasal 11 PP No 38 tahun 2011 belum terlaksanakan dengan baik karena di sempadan sungai Code Yogyakarta masih banyak sekali bangunan yang berada di bantaran sungai tersebut, yang mana jarak tepi kanan dan tepi kiri sungai belum sesuai dengan ketentuan dalam PP No 38 tahun 2011.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dengan judul **ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI CODE DARI PENCEMARANNYA DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PP NO 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI**

³ <https://jurnalilmiahtp2013.com> , Diakses pada tanggal 06 september 2019 Pengelolaan kawasan sungai code berbasis masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah Bagaimana aspek hukum perlindungan sungai Code dari pencemarannya di kota yogyakarta berdasarkan PP 38 tahun 2011 tentang sungai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui aspek hukum perlindungan sungai Code dari pencemarannya di kota yogyakarta berdasarkan PP 38 tahun 2011 tentang sungai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai adalah Aspek hukum perlindungan sungai Code dari pencemaran lingkungan berdasarkan PP 38 tahun 2011 tentang sungai.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta

Bagi dinas lingkungan hidup untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup agar dapat melakukan pengendalian pencemaran karena lingkungan merupakan suatu hal yang penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dan sebagai acuan untuk menambah program yang dapat dikembangkan lagi untuk memberikan kesadaran terhadap pentingnya kebersihan dalam suatu lingkungan hidup.

- b. Bagi Dinas Perkerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk lebih sadar serta peduli yang mana masih banyak masyarakat ekonomi rendah yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk di huni dan di dirikan permukiman di sungai.
- c. Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini, dimana agar masyarakat yang mana mendirikan permukiman di sempadan sungai/bantaran sungai Code agar memiliki pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik daripada sebelumnya agar sungai Code dapat difungsikan dengan baik, karena Sungai merupakan kawasan lindung yang harus dilindungi dan di lestarikan.
- d. Bagi Penulis sendiri yang mana sebagai dasar untuk menambah ilmu dan menghargai arti penting dari sebuah lingkungan hidup, serta memenuhi syarat kelulusan dalam Strata-1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul adalah Aspek hukum perlindungan pencemaran lingkungan berdasarkan PP No 38 tahun 2011 merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan suatu bentuk plagiasi dari skripsi orang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi yaitu:

1. Disusun oleh : sulthan shalahuddin nur
 Npm : 1515010109111005
 Fakultas : Fakultas Hukum Bisnis Syariah
 Universitas : Universitas islam negeri maulana malik ibrahim
 judul skripsi : Penegakan hukum terhadap bangunan bantaran
 sungai perspektif masalah mursalah
 Tahun : 2016

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana Penegakan hukum terhadap bangunan bantaran sungai di Jayutambaksari kecamatan lowokwaru Kota Malang ?
- b. Bagaimana Relevansi antara kemanfaatan umum dan penegakan hukum terhadap bangunan perspektif masalah mursalah di bantaran sungai jalan Jayutambaksari kecamatan lowokwaru Kota Malang ?

Hasil penelitian :

Objek lokasi penelitian yang menjadi sasaran penulis dalam meninjau kasus yang sangat hangat terjadi di berbagai daerah perkotaan yaitu bantaran sungai. Bantaran sungai yang mana berada di wilayah sempadan sungai yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti ini berlokasi di jalan joyotambaksari kecamatan lowokwaru kota malang. Lokasi ini terletak di Indonesia yang berada di Jawa Timur, bantaran sungai di lokasi penelitian ini merupakan bantaran sungai kecil, yang awalnya jarak berukuran lebih 5 meter dari kanan dan kiri bibir sungai.

Pada diskusi rukun tetangga (RT) 01 pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 20.00 WIB di salah satu rumah warga ketika setelah kegiatan menghasilkan suatu argumen yang mana dengan berkaitan bangunan di bantaran sungai tersebut. Pada kenyataannya di bantaran sungai jalan joyotambaksari kecamatan lowokwaru kota malang ini penegakan hukum di wilayahnya tersebut masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Menurut penulis, hal ini disebabkan karena 3 (tiga) faktor, diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran atas kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terutama terhadap keberlanjutan fungsi dari sungai.
2. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap peraturannya yang dibuat dengan menyaksikan kondisi real di masyarakat, dan
3. Sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran saja.

Menurut penulis ketidakselarasan antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan oleh faktor ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya, ketidakdisiplinan bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa serta hukum yang diciptakan masih belum benar-benar yang bersendikan keadilan sehingga kewibawaan hukum di masyarakat menjadi rendah.

2. Disusun oleh : Dwi Prastiandiani
 Fakultas : Fakultas Hukum dan Pemerintahan
 Universitas : Universitas Airlangga
 judul skripsi : Penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan
 sempadan sungai di Kabupaten Sidoarjo
 Tahun : 2017
 Hasil penelitian :

Status bangunan liar telah banyak menimbulkan konflik dari aspek sosial baik dari masyarakat pemilik maupun dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo pada kenyataannya belum membuahkan hasil yang optimal dalam penertiban sempadan sungai. Hal ini disebabkan ada faktor di luar norma atau yuridis yang menjadi pertimbangan dalam norma atau yuridis yang menjadi pertimbangan dalam penertiban bangunan pelanggar tersebut. Tahapan-tahapan yang

dilakukan dalam rangka penertiban di sempadan Sungai Wilayut sama dengan tahapan-tahapan yang dilakukan penertiban lainnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan melalui:

- a. Koordinasi Dinas/Instansi terkait Dalam melaksanakan tindakan hukum administrasi Dinas PU Pengairan juga melibatkan instansi terkait dalam membantu penegakkan hukum administrasi dalam pelanggaran sempadan tersebut yaitu:
 1. Melibatkan Camat dan Kepala Desa setempat untuk berperan aktif membantu pelaksanaan penertiban sempadan saluran
 2. Melakukan pertemuan koordinatif Dinas/Instansi terkait (Satuan Pamong Praja, Aparat Wilayah Kecamatan/Desa) untuk membahas langkah-langkah penertiban.
- b. Sosialisasi; tahapan sosialisasi ini sangat penting untuk memperkecil permasalahan sosial yang timbul akibat pelaksanaan penertiban. Sosialisasi Penertiban Sempadan Sungai Wilayut dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015 di Kantor Kecamatan Buduran dengan dihadiri oleh seluruh pemilik bangunan liar di sempadan sungai Wilayut. Pada pertemuan ini disampaikan akan diluncurkan Teguran ke III atau teguran terakhir dari Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo. Karena setelah itu baru kewenangan penertiban dilimpahkan ke Satpol PP.
- c. Pendataan; kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo. Pendataan dilakukan terhadap

semua bangunan liar yang berada di sempadan sungai. Pelanggar (pemilik bangunan liar) menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh petugas pendata.

- d. Tahapan selanjutnya adalah teguran I, teguran II dan teguran III dari instansi Satpol PP dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. Teguran ini sekaligus pemberitahuan pelaksanaan pembongkaran bangunan-bangunan liar. Tahapan-tahapan sebelum pelaksanaan penertiban sangat panjang kurang lebihnya hampir 6 (enam) bulan mulai dari pendataan, surat teguran, sosialisasi dan koordinasi dengan wilayah. Hal ini dimaksudkan perlu adanya pendekatan secara sosial kepada masyarakat bangunan liar di sempadan sungai Wilayat. Agar mereka benar-benar memahami aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang aturan sempadan sungai. Pemerintah berharap mereka dengan kesadarannya sendiri membongkar bangunan liarnya tanpa pembongkaran paksa.

3. Disusun oleh : Muhammad Singgih Prakoso

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

judul skripsi : Pendirian permukiman di garis sempadan sungai

Gajah Wong Kampung Balirejo muja muju

umbulharjo yogyakarta

Tahun : 2017

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di sempadan Sungai Gajah Wong?
- b. Apa kendala penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di sempadan Sungai Gajah Wong?

Hasil penelitian :

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan yang harus di taati oleh masyarakat agar terciptanya ketertiban. Dimana hukum memiliki peran dalam perubahan sosial masyarakat yang dalam hal ini suatu lingkungan tersebut dan mempengaruhi kehidupan sosial yang ada di tempat itu. Cara-cara untuk mempengaruhi kehidupan sosial dengan upaya yang tepat untuk menindak lanjuti permasalahan sosial yang ada di suatu lingkungan itu sendiri.

Permukiman di sempadan sungai gajah wong kampung balirejo muja muju umbulharjo yogyakarta. Dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk dan tidak meratanya lahan hunian yang semakin tahun semakin berkurang. Inilah yang menyebabkan tumbuh dan timbulnya permukiman di bantaran sungai gajah wong kampung muja muju umbulharjo yogyakarta. Hal ini menyebabkan permukiman yang berada di garis sempadan sungai gajah wong kampung balirjo mjamuju umbulharjo yogyakarta didalam

kenyataannya bertentangan dengan peraturan yang terkait dengan tata ruang khususnya mengenai garis sempadan sungai yang mana berdasarkan Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang kawasan sempadan sungai merupakan kawasan lindung.

Dengan demikian permukiman yang di dirikan berarti melanggar fungsi kawasan tersebut, yang mana kawasan tersebut sebagai kawasan lindung. Pada pasal 140 Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menjelaskan, setiap orang dilarang membangun perumahan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang barang atau orang. Di undang-undang tersebut di jelaskan bahwa pendirian bangunan permukiman yang didirikan di garis sempadan sungai Gajah Wong termasuk melanggar fungsi kawasan lindung.

Dengan ketidakdisiplinan bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa serta hukum yang di ciptakan masih belum benar-benar yang bersendikan keadilan sehingga kewibawaan hukum di masyarakat menjadi rendah. *Kedua*, lebih menekankan pada sanksi-sanksi yang diterima oleh masyarakat yang mendirikan bangunan liar di bantaran sungai, dimana sanksi tersebut berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. *Ketiga*, lebih menekankan pada adanya ketidak sesuaian antara undang-undang mengenai sempadan sungai dan yang terjadi di garis sempadan sungai gajah

wong kampung balirejo muja muju umbulharjo yogyakarta. Karena dengan adanya bangunan-bangunan di sempadan sungai tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di sekitaran sungai tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Yang dimaksud dengan aspek hukum dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap perlindungan sungai berdasarkan hukum, khususnya PP No. 38 Tahun 2011 tentang sungai.

2. Sungai

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No.38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang dimaksud dengan sungai adalah Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

3. Perlindungan Sungai

Berdasarkan penjelasan atas PP No. 38 Tahun 2011 tentang sungai pada Pasal 20 ayat (1) yang dimaksud dengan perlindungan sungai adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan fungsi sungai

4. Sungai Code

Sungai Code yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sungai yang melewati kelurahan keparakan kecamatan Mergangsan

5. Pencemaran Lingkungan hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

6. Pencemaran Sungai

Pencemaran sungai adalah masuknya polutan atau zat-zat kimia berbahaya ke dalam air sungai sehingga merubah warna dan bau air serta akibat dari aktivitas manusia⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Aspek Hukum Perlindungan Sungai Code dari pencemarannya di Kota Yogyakarta berdasarkan PP nomor 38 tahun 2011 ini merupakan penelitian hukum empiris. Pengertian Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. yang mana suatu analisis terhadap hasil penemuan kepustakaan telah dijelaskan secara singkat dan pada penelitian lapangan yang mana menghubungkan beberapa hasil penemuan-penemuan sosial sebagai data sekunder.⁵

⁴ <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/sungai/pencemaran-air-sungai>

⁵ Soerjono soekantp, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet.1, IND-HILL-CO, Jakarta, hlm, 139-140

2. Sumber Data

Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber mengenai objek yang diteliti sebagai bahan utama dalam penelitian.

b. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum primer

- a) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup
- b) PP No 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- c) PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- d) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 18 Tahun 2002 tentang pengelolaan kebersihan
- e) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah

2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan data statistik dari instansi/lembaga resmi pemerintah, serta wawancara dari pejabat yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan hidup

Yogyakarta, Dinas Dinas Perkejaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Pedoman dalam melakukan wawancara menggunakan daftar pertanyaan terbuka dengan maksud supaya mendapatkan informasi yang menyeluruh berkenaan dengan substansi wawancara yang akan dilakukan kepada narasumber. Penelitian menggunakan recoder yang ada pada aplikasi telephone seluler dalam melakukan wawancara kepada narasumber sesuai dengan terkait penelitian Aspek Hukum Perlindungan Sungai Code dari pencemaran di Kota Yogyakarta berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2011.
- b. Cara dalam memperoleh data sekunder dapat dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer yang mana meliputi dari peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder yang mana meliputi pendapat hukum yang di peroleh dari buku, jurnal, fakta hukum, data statistik dari instansi/ lembaga pemerintah, serta wawancara dari pejabat pemerintah yang berkaitan.

4. Narasumber

- 1) Bapak Pieter Lawoasal, ST.,MT selaku Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Ibu Intan Dewani,ST.,M.eng selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- 2) Ibu Yunita Rahmi Hapsari, M.eng Selaku Kepala seksi Penataan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dan Ibu Cicilia Novi H, M.eng selaku Kepala Seksi Perumahan dan Pra Sarana Dasar Permukiman Kota Yogyakarta di Dinas Perkerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
- 3) Bapak Amri Suhartono Ketua RT 36 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan dan Ibu Dwi suharyati Selaku Warga RT 37 yang tinggal di Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan.

5. Analisa Data

Cara yang akan digunakan adalah dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode analisis dan kualitatif berupa pendekatan pengolahan secara mendalam mulai dari data hasil pengamatan, wawancara, dan data literatur.⁶ Selanjutnya untuk melakukan penarikan kesimpulan yang mana menggunakan metode berfikir induktif yaitu yang mana dilakukan dengan pengamatan

⁶ Ayat hidayat Huang, metode analisis data, <http://www.en.globalistatistik.com/metode-analisis-data/>, diakses pada tanggal 5 september 2019

terlebih dahulu setelah pengamatan selesai barulah ditarik kesimpulan atas pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut dengan pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus yang mana menjadi kesimpulan yang umum⁷.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Sungai Code yang berada di kelurahan keparakan, kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Dimana Penggunaan lahan sekitar lebih dominan permukiman padat di bantaran sempadan Sungai Code.

⁷ Baabyrosemarry Rosemarry, Pendekatan induktif dan deduktif , <https://www.scribd.com/doc/194455646/pendekatan-induktif-dan-deduktif/>, diakses pada tanggal 5 september 2019